

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Al-Quran dan Terjemahannya. Kementerian Agama Republik Indonesia. Klaten: SAHABAT, 2013

BUKU

A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.

Abdul Wahab Khallaf. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1993.

Aden Rosadi. *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum* Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2015.

Ahmad Fathoni Ramli. *Administrasi Peradilan Agama, Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2013.

Bambang Sutiyoso dan Sri Puspitasari. *Aspek-Aspek Pengembangan Kekuasaan Kehakiman*, Yogyakarta : UII Press.

C.S.T. Kansil. *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

F.A.M. Stroink dalam Philipus Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991).

Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Dalam Periode Berlakunya UUD 1945.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-court The Electronic Justice System*, Mahkamah Agung, 2019.

Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2000.

Mohammad Saleh, *Penerapan Asas Peradilan, Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Cet. 3, Yogyakarta: Graha Cendekia, 2016.

Muhammad Salam Madur, *Peradilan Dalam Islam*. Cet. IV Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1988.

Pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

- R. Subekti dan R. Tjitcosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1971.
- Sedianingsih, *et.al.*, *Teori dan Praktik Administrasi Kesekretariatan*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum acara Perdata*, Bandung: PT Alumni, 1992.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992.
- Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. 4 Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty: Yogyakarta, 2005.
- Sulaikin Lubis, Wismar'ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Perailan Agama Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Wildan Suyuthi, *Panitera Pengadilan, Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2002.

JURNAL

- Aco Nur dan Aman Fakhrur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama Era Baru*
- Hary Djatmiko, *Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik*, LEGALITA, Vol. 01, No. 01 Agustus–Desember 2019.
- Ika Atikah, *Implementasi E-Court dan Dampaknya terhadap Advokat dalam Proses Pnyelesaian perkara di Indonesia*, “*Proceeding- Open Society Conference 2018, Social and Political Challenges in Industrial*”, hal. 109. <https://repository.ut.ac.id.>, diakses pada tanggal 20 Juni 2020
- Ni Putu Riyani Kartika Sari, “Eksistensi *E-Court* Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di

Indonesia”, Artikel: Dosen Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, Juni 2019, hal. 6.

Nizami Learning Center .*Sistem Peradilan di Indonesia*, Sidoarjo:Nizami Learning Center, 2019.

Sonyendah Retnoningsih, *Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia)*, 2019

Zil Aidi, *Masalah-Masalah Hukum: Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien*, Jilid 49, No.1, 2020, hal. 80-89

PERATURAN

Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009,.

_____, Peraturan Mahkamah Agung tentang *Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

_____, Peraturan Presiden tentang Kepaniteraan, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005.

_____, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkama Agung, “Nomor: 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014.

INTERNET

Ditjenmiltun Mahkamah Agung RI, “*E-Court*, Era Baru Beracara di Pengadilan”, <https://www.pt-bengkulu.go.id/berita/e-court-era-baruberacara-di-pengadilan>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2020.

Law UAD “Responsivitas Lembaga Peradilan dalam Pemenuhan Keadilan Hukum bagi Masyarakat Melalui *E-Court*” law.uad.ac.id/responsivitas-

lembaga-peradilan-dalam-pemenuhan-keadilan-hukum-bagi-masyarakat-melalui-e-court/. Diakses pada tanggal 20 Maret 2020.

Wikipedia Indonesia “*Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*”
https://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan_kehakiman_di_Indonesia diakses pada tanggal 20 Maret 2020

Inside Of Me, *Administrasi Peradilan*,
<http://areabeku.blogspot.com/2009/08/administrasi-peradilan.html?m=1>
 Diakses pada tanggal 17 Maret 2020

Universitan Janabdra. *Penerapan e-Court Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Era New Normal*, Web-seminar Fakultas Hukum, Universitas Janabdra, 7 Juli 2020.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *e-Court Mahkamah Agung RI* ,
<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal 30 Juni 2020.

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, *Artikel Sekilas e-Court : Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, <http://pn-tebingtinggi.go.id/component/zoo/item/artikel-sekilas-e-court-beracara-di-pengadilan-secara-elektronik.html?Itemid=236> Diakses pada tanggal 15 Juni 2020.

Hukum Online, *Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt509fb7e13bd25/lex-spesialis-dan-lex-genralis/>. Diakses pada tanggal 4 Juli 2020

JDIH-LIPI. *Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan*,
https://jdih.lipi.go.id/?page=pengetahuan_praktis&id=138. Diakses pada tanggal 20 Maret 2020.